

PERAN UNICEF DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA

Marini Syifa Sari Putri¹, Sri Yuniati², Pra Adi Soelistijono³

¹Universitas Jember

²Universitas Jember

³Universitas Jember

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk menjamin hak anak atas pendidikan, kesenjangan akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan besar, terutama bagi anak-anak dari kalangan ekonomi lemah dan daerah terpencil. United Nations Children's Fund (UNICEF) berperan penting dalam mendukung pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia melalui berbagai program dan kerja sama dengan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNICEF dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks peran organisasi internasional sebagai instrumen menurut konsep Clive Archer. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan pendidikan anak melalui pelaksanaan program-program yang inovatif dan penguatan kemitraan lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran organisasi internasional, seperti UNICEF, dalam mendukung pemenuhan hak atas pendidikan dan mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Anak, Pendidikan Anak, Organisasi Internasional, UNICEF

ABSTRACT

Education is a basic right of every child recognized in various international and national legal instruments, including the Convention on the Rights of the Child (KHA) and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although the Indonesian government has adopted various policies to guarantee children's right to education, disparities in access to education remain a major challenge, especially for children from economically disadvantaged backgrounds and remote areas. The United Nations Children's Fund (UNICEF) plays an important role in supporting the fulfillment of children's right to education in Indonesia through various programs and cooperation with the government. This study aims to analyze the role of UNICEF in efforts to fulfill children's right to education in Indonesia, especially in the context of the role of international organizations as instruments according to Clive Archer's concept. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach and secondary data analysis. The results show that UNICEF plays a significant role in overcoming barriers to children's education through the implementation of innovative programs and strengthening cross-sector partnerships with various stakeholders. This research emphasizes the importance of the role of international organizations, such as UNICEF, in supporting the fulfillment of the right to education and promoting the nation's progress in a sustainable manner.

Keywords: Child education, children's right, international organizations, UNICEF

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan dan hak anak untuk tumbuh serta berkembang merupakan salah satu prioritas setiap negara karena anak-anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memahami bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia (HAM) yang patut dihormati serta dijaga dengan konsisten di seluruh dunia. Dalam upaya memastikan hal tersebut, pada tanggal 20 November tahun 1989 PBB mengesahkan Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of The Child* atau UNCRC). Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk mengatur standar hak dasar dan kepentingan anak-anak yang belum berusia 18 tahun dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. UNCRC berisi empat pilar utama dan 54 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak untuk tumbuh kembang. (1)

Salah satu pilar utama UNCRC adalah hak anak atas pendidikan yang dijelaskan dalam pasal 28 bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas dan gratis, serta dapat mengakses pendidikan menengah dan pendidikan yang lebih tinggi.

Hak pendidikan adalah hak dasar setiap individu, terlepas dari status sosial dan ekonomi, untuk mengakses pendidikan yang dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan setiap individu, yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, dapat meningkatkan kualitas hidup, memutus rantai kemiskinan dan dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat karena pendidikan. (2)

Berdasarkan hukum internasional tentang hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh warga negaranya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan bagi seluruh warga

negaranya, serta mewajibkan warga negara Indonesia mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap anak berhak mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal.

Secara keseluruhan, Indonesia telah memiliki hukum dasar yang mengatur hak pendidikan. Akan tetapi pada kenyataannya, Indonesia juga masih menghadapi tantangan besar dalam akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Menurut data yang diperoleh oleh UNICEF, sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja Indonesia dalam rentang usia 7-18 tahun tidak mengikuti pendidikan formal, sedangkan remaja usia 13-15 tahun yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu, menghadapi hambatan yang lebih besar dalam kelanjutan pendidikan, baik karena keterbatasan biaya, kurangnya fasilitas, maupun kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Selain itu, anak-anak dari daerah terpencil dan pedalaman juga mengalami kesulitan akses ke sekolah yang berkualitas karena kurangnya perhatian khusus dari pemerintah. Realitas tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasar mereka untuk mengenyam pendidikan. (3,4)

Dalam mengatasi permasalahan yang menghambat pendidikan di Indonesia, Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik aktor negara maupun non-negara, seperti organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti program bantuan finansial ataupun kontribusi tenaga ahli dari aktor non-negara. Salah satu organisasi internasional yang berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Sebagai organisasi PBB yang befokus pada

perlindungan hak anak di seluruh dunia, UNICEF memiliki peran penting dalam mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan anak. Kerja sama antara berbagai aktor tersebut juga diperlukan untuk memastikan implementasi program-program yang berkelanjutan dan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat. (5)

Uraian di atas secara jelas menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi hak pendidikan anak. Meskipun Indonesia mempunyai regulasi hukum yang kuat mengenai pendidikan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 mengenai wajib belajar, kesenjangan ekonomi tetap menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak Indonesia. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung yang hasil akhirnya adalah angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun sejalan dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal tersebut juga membuktikan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan dari pihak lain, termasuk keterlibatan organisasi internasional seperti UNICEF untuk mendukung upaya mereka dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mencari tahu peran UNICEF dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak pendidikan anak di Indonesia. (6)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran UNICEF dalam konteks pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia. Data diperoleh melalui studi literatur dengan sumber-sumber seperti dokumen resmi UNICEF, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan situs web terpercaya. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan triangulasi sumber yang merujuk pada konsep Miles dan Huberman untuk memvalidasi data dari berbagai sudut pandang.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 UNICEF di Indonesia

UNICEF pertama kali didirikan oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1946 sebagai bentuk kekhawatiran seluruh dunia terhadap penderitaan anak dan ibu yang terkena dampak Perang Dunia II. Tujuan awal dari terbentuknya organisasi ini adalah memberikan bantuan darurat kepada ibu dan anak-anak yang berada di wilayah konflik, seperti Eropa, dan Tiongkok.

Sejak didirikan oleh PBB pada tahun 1946, UNICEF telah menunjukkan komitmennya dalam berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di lebih dari 190 negara, termasuk Indonesia. Keterlibatan UNICEF di Indonesia dimulai pada tahun 1948 ketika Pulau Lombok dilanda kekeringan parah yang menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan hidup anak-anak akibat kelaparan dan malnutrisi. Seiring berjalannya waktu, peran UNICEF di Indonesia semakin berkembang. (7)

Dalam mewujudkan misinya tentang menciptakan dunia yang aman, sehat, dan penuh kesempatan bagi anak-anak, UNICEF menunjukkan komitmennya melalui berbagai kerja sama. Salah satunya adalah kerja sama yang terjalin adalah dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) dan Kementerian atau Lembaga lain dalam peluncuran Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS). Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk memastikan kemudahan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan relevan bagi seluruh anak di Indonesia sehingga tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam pendidikan. (8)

3.2 Kondisi Pendidikan di Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak. Fenomena anak putus sekolah, kesenjangan akses pendidikan yang tidak merata, serta berbagai faktor penghambat lainnya mencerminkan

ketimpangan yang belum terselesaikan. Padahal, hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional. Di sisi lain, pendidikan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai investasi penting untuk masa depan. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan menjadi fondasi bagi anak-anak untuk mencapai impiannya dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, fakta bahwa banyak anak masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas menunjukkan adanya masalah sistemik yang perlu diselesaikan secara keseluruhan. (9)

Keterbatasan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pendidikan. Banyak keluarga di Indonesia yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga tidak sanggup menanggung biaya pendidikan meskipun pemerintah telah menyediakan program pendidikan gratis. Akibatnya, banyak anak yang terpaksa putus sekolah, terlebih anak yang telah dianggap usianya sudah dapat bekerja, untuk membantu ekonomi keluarga dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, kondisi geografis Indonesia juga menjadi faktor lainnya yang menghambat pendidikan. Masyarakat yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) harus menghadapi keterbatasan tenaga pengajar dan minimnya infrastruktur pendukung pembelajaran yang berpengaruh pada akses dan kualitas pendidikan.

3.2.1 Anak Putus Sekolah

Putus sekolah adalah kondisi ketika seorang murid yang memilih berhenti dan tidak melanjutkan pendidikan formalnya. Umumnya, anak putus sekolah dikategorikan kepada anak usia sekolah, yakni antara usia 7-21 tahun. Kondisi tersebut tentu memiliki dampak yang sangat merugikan anak maupun masyarakat. Bagi anak, putus sekolah menghambat mereka untuk

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing dalam dunia kerja. Sementara dalam skala yang lebih luas, putus sekolah menurunkan produktivitas nasional sehingga berdampak buruk bagi masa depan suatu bangsa karena dapat menghambat pembangunan negara. (10)

Putus sekolah merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sukmadinata dalam menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi penghalang utama bagi anak untuk melanjutkan pendidikan. Pendapatan orang tua yang tidak stabil dan tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga menciptakan situasi perencanaan pengeluaran menjadi sulit. Kondisi ini diperburuk oleh jumlah anggota keluarga yang banyak serta pengeluaran lainnya, seperti biaya transportasi, kebutuhan pribadi, dan uang saku. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pendapatan memaksa anak-anak untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka harus mengorbankan waktu belajar dan pendidikan mereka terabaikan. Fenomena ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada subsidi pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai solusi yang lebih komprehensif. (11)

Anak-anak di Indonesia yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dirilis oleh BPS. (12)

Data tersebut menunjukkan adanya korelasi antara tingkat jenjang pendidikan yang dicapai dengan kondisi ekonomi keluarga, yang dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ingin dicapai, maka semakin besar juga kemungkinan anak untuk putus sekolah, terutama pada jenjang SMA. Fenomena

ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi hambatan utama bagi keluarga dalam membiayai pendidikan anak.

Anak-anak dari keluarga dengan pengeluaran yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan, seperti biaya sekolah, bimbingan belajar, dan fasilitas belajar yang memadai. Akses-akses tersebut memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pendidikan tanpa terbebani oleh masalah finansial sehingga mereka dapat mencapai tingkat penyelesaian yang lebih tinggi. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi seringkali harus menghadapi pilihan sulit, yakni melanjutkan sekolah dengan segala keterbatasan atau berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya pendidikan yang terus meningkat, termasuk biaya tidak langsung seperti transportasi dan perlengkapan belajar, semakin memperparah situasi ini.

3.2.2 Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan menjadi masalah lainnya yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ketimpangan tersebut terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan daerah tertinggal. Faktor-faktor seperti sulitnya akses menuju sekolah, keterbatasan infrastruktur, distribusi guru yang tidak merata, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memperparah ketidaksetaraan tersebut. Jika tidak segera ditangani, ketimpangan pendidikan dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, menghambat mobilitas sosial, serta berdampak negatif pada pembangunan nasional. (13)

Sebagai negara kepulauan, kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang

berkontribusi terhadap ketimpangan akses pendidikan. Banyak wilayah yang terdiri atas daerah terpencil dan terisolasi sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi tantangan besar bagi para siswa. Beberapa daerah seperti Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua, mengalami kendala besar dalam menyediakan akses pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jarak tempuh yang jauh dan kondisi medan yang sulit tidak hanya menghambat proses pembelajaran, tetapi juga dapat mempengaruhi semangat serta motivasi siswa dalam mengenyam pendidikan.

Ketimpangan akses pendidikan semakin diperparah oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, termasuk jumlah sekolah yang terbatas dan kondisi fasilitas yang jauh dari standar layak. Keterbatasan infrastruktur tidak hanya menghambat akses langsung terhadap pendidikan, tetapi juga membatasi kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai alat bantu pembelajaran. Padahal, pemanfaatan teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat distribusi pengetahuan, terutama di daerah terpencil. Selain itu, implementasi kurikulum merdeka yang telah dirancang oleh Pemerintah Indonesia juga tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat keterbatasan sarana pendukung dan tenaga pengajar. Ketimpangan tersebut semakin memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, yang pada akhirnya berdampak pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat. (14)

Ketimpangan pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh masalah kualitas dan distribusi tenaga pendidikan di Indonesia yang belum merata. Banyak guru yang menolak untuk ditempatkan oleh Pemerintah Indonesia atau instansi terkait di daerah terpencil dengan berbagai alasan seperti, keterbatasan finansial, minimnya tunjangan, dan terbatasnya kesempatan untuk pengembangan karier. Guru honorer, khususnya, seringkali tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak

seperti guru PNS yang bekerja di perkotaan sehingga memperburuk kekurangan tenaga pengajar di daerah-daerah tersebut. (15)

4. PEMBAHASAN

Organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan negara-negara di dunia. Anggita dan Dewi menjelaskan bahwa peran organisasi internasional tercermin melalui berbagai bentuk partisipasi yang mereka lakukan untuk membantu negara-negara untuk mencapai tujuan yang menjadi bagian dari kepentingan nasionalnya. Sejalan dengan pandangan Archer, yang menekankan pentingnya keterlibatan organisasi internasional dalam menciptakan solusi terhadap permasalahan global maupun nasional. Kehadiran UNICEF di Indonesia menjadi salah satu contoh nyata peran tersebut. Sebagai organisasi yang fokus pada perlindungan hak anak, UNICEF berkomitmen untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak yang kurang beruntung dan belum terpenuhi secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia. (16,17)

Selama beroperasi di Indonesia, UNICEF secara aktif mendukung kebijakan maupun program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi anak-anak. Kerja sama tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mengatasi tantangan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok kurang beruntung. Salah satu upaya konkret oleh Pemerintah Indonesia adalah peluncuran Strategi Nasional Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada tahun 2020. Stranas ATS berperan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan, sekaligus pihak-pihak terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dalam mengatasi problematik anak tidak bersekolah di seluruh jenjang pendidikan. (18)

Stranas ATS merupakan suatu bentuk respons terhadap tantangan pendidikan di Indonesia dan menjadi langkah strategis untuk menjangkau anak-anak yang kehilangan hak atas pendidikan. Stranas ATS secara khusus menargetkan anak-anak yang tidak pernah bersekolah, maupun anak putus sekolah dengan rentang usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun. Peluncuran Stranas ATS dilatarbelakangi oleh fakta bahwa rata-rata capaian pendidikan Indonesia yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Pada tahun 2022 sendiri, Indonesia menduduki peringkat keenam dari delapan negara ASEAN yang terdaftar dalam program penilaian siswa internasional (PISA). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih sangatlah rendah. Sekretaris Kementerian PPN mengatakan bahwa terdapat peningkatan rata-rata masa sekolah anak dari 7,92 pada tahun 2010, menjadi 8,67 pada tahun 2019. Akan tetapi, capaian tersebut dianggap belum mencukupi untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, Stranas ATS menjadi pijakan penting dalam upaya mendorong perbaikan pendidikan yang lebih merata dan inklusif. (19,20)

Selain rendahnya capaian pendidikan, kesenjangan akses pendidikan antara wilayah dan kelompok masyarakat juga menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi. Anak-anak di wilayah terpencil, pedalaman, dan daerah tertinggal sering kali memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Serangkaian problematika tersebut menjadi dorongan untuk Pemerintah Indonesia dalam menyusun dan meluncurkan Stranas ATS. Menurut Bappenas, peresmian Stranas ATS bertujuan untuk memastikan adanya perbaikan, perluasan, penguatan, sekaligus koordinasi yang efektif dari serangkaian program Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mengenai aksesibilitas pendidikan, maupun pelatihan untuk seluruh anak di Indonesia. Langkah tersebut dibuat oleh

Pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh anak, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan. (18)

Dalam rangka mencapai hasil yang lebih optimal, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dan implementasi Stranas ATS. Mempertimbangkan kompleksitasnya, Pemerintah Indonesia, khususnya PPN/Bappenas memutuskan untuk bekerja sama dengan UNICEF yang berbasis di Indonesia. UNICEF memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dan pengimplementasian Stranas ATS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia, UNICEF melalui Stranas ATS berusaha untuk terlibat dalam inisiatif-inisiatif yang telah direncanakan bersama dengan pihak Pemerintah Indonesia, maupun pihak terkait lainnya dalam mempertahankan murid-murid di sejumlah wilayah di Indonesia untuk tetap bersekolah, sekaligus turut membuka kesempatan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak bersekolah untuk bisa merasakan pengalaman belajar berkualitas.

UNICEF berperan signifikan dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dengan memberikan dukungan yang komprehensif. Peran tersebut tidak hanya mencakup penyediaan data dan analisis mendalam mengenai kondisi anak tidak sekolah, tetapi juga pengembangan kerangka kebijakan yang tangguh serta dukungan teknis untuk memastikan implementasi program berjalan efektif. Signifikansi peran UNICEF terkait Stranas ATS dapat dikaji melalui indikator konsep organisasi internasional. Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional teridentifikasi dari tiga indikator utama yang terdiri dari alat, forum, dan aktor. Peran UNICEF dalam memenuhi hak pendidikan anak di Indonesia diidentifikasi dengan peran sebagai alat. Peran UNICEF sebagai alat berfungsi untuk membantu Pemerintah Indonesia dengan berkontribusi langsung dalam kebijakan Stranas ATS. Melalui berbagai

program, UNICEF berusaha memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. UNICEF memainkan peran penting dalam membantu mengelola tantangan global, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Archer yang menyatakan bahwa organisasi internasional dapat menjadi alat bagi negara-negara anggotanya untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang memengaruhi banyak negara. (17)

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam sektor pendidikan pada tahun 2020 adalah pandemi Covid-19. Pandemi tersebut menyebabkan gangguan signifikan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Lebih dari setengah juta sekolah terpaksa ditutup dan berakibat lebih dari 60 juta siswa harus belajar di rumah. Dalam merespons tantangan ini, UNICEF bekerja sama dengan Kemendikbud pada tahun 2020 untuk mengembangkan pedoman serta alat bantu yang berfungsi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan memfasilitasi pembukaan kembali sekolah secara aman. (21)

Melalui program tersebut, UNICEF berupaya memastikan kelangsungan pembelajaran bagi anak dan remaja dengan menyediakan modul pembelajaran berbasis rumah serta mendukung implementasi metode pembelajaran digital. Selain itu, UNICEF juga berkontribusi dalam mendukung perumusan kebijakan terkait protokol kesehatan di lingkungan sekolah untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman bagi siswa dan tenaga pendidik saat proses pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Upaya yang dilakukan oleh UNICEF tidak hanya berfokus pada aspek teknis dalam pembelajaran jarak jauh, tetapi juga mendukung advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi kelompok rentan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk

mengurangi angka putus sekolah serta memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas meskipun dalam kondisi darurat. (1,22)

Pada tahun 2021, UNICEF mengambil langkah lanjutan dalam mendukung sistem pendidikan yang adaptif dan berdaya saing dengan menginisiasi Program Pengembangan Keterampilan Abad ke-21. Program tersebut dibuat untuk mempersiapkan anak-anak dan remaja Indonesia dalam menghadapi tantangan era modern yang ditandai dengan perubahan teknologi yang pesat. Fokus utama program tersebut adalah penguatan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Keterampilan-keterampilan tersebut menjadi kebutuhan yang esensial untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial di abad ke-21. Untuk mendukung implementasinya, UNICEF mengembangkan platform pelatihan daring bagi guru untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengajarkan keterampilan tersebut di lingkungan sekolah. Harususilo pada Kompas.com menyatakan bahwa pada tahun 2021, program tersebut telah berhasil menjangkau lebih dari 4.700 murid dari kelompok terpinggirkan, dengan 58% di antaranya adalah anak perempuan. (23,24)

Sejalan dengan upaya UNICEF dalam meningkatkan keterampilan pada abad ke-21, UNICEF juga mendukung program Pembelajaran Digital Berkualitas bagi Semua yang dipublikasikan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2021. Program tersebut bertujuan untuk mempercepat akses pendidikan berbasis teknologi yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam memanfaatkan teknologi sebagai penunjang kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. UNICEF bersama Kemendikbudristek mengadakan pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pemanfaatan teknologi dalam

pendidikan. Program tersebut berfokus pada perluasan akses internet dan teknologi di sekolah-sekolah, dengan harapan siswa dapat memanfaatkannya dalam praktik Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, program tersebut juga mendukung inisiatif yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebelumnya, yakni platform Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi, yang bertujuan untuk mengembangkan talenta digital tenaga pendidik. Dalam pelaksanaannya, UNICEF, melalui perwakilannya, Debora Comini, menyediakan ruang diskusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap transformasi pendidikan di Indonesia berbasis teknologi. Melalui berbagai diskusi dan kolaborasi, UNICEF berharap dapat mendorong solusi inovatif yang mempercepat transformasi pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. (1)

Selain mendukung transformasi digital dalam pendidikan, UNICEF juga berperan aktif dalam menangani permasalahan anak tidak sekolah (ATS). Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui program Gerakan Remaja Hebat (GRH) yang diluncurkan pada tahun 2021 sebagai adaptasi program lingkaran remaja yang telah dikembangkan oleh UNICEF. Program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam menangani ATS di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dirancang sebagai solusi inovatif yang menyediakan wadah belajar alternatif bagi remaja, khususnya pada anak yang berada dalam kategori ATS, dengan fokus pada pengembangan kompetensi diri agar mereka tetap memiliki akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang relevan. (25)

Sejak pertama kali diresmikan, UNICEF telah berhasil mengimplementasikan GRH di 8 provinsi dengan dukungan pemerintah daerah. Salah satu aspek dari program tersebut adalah pemberdayaan 150 pemuda lokal yang nantinya berperan sebagai tenaga pengajar bagi remaja yang termasuk dalam kategori ATS. Pelatihan tersebut mencakup penguatan keterampilan

mengajar, pemahaman tentang kebutuhan remaja ATS, serta pendekatan berbasis inklusi sehingga para pemuda mampu memberikan dampak positif yang nyata. Program tersebut tidak hanya menjadi sarana pembelajaran alternatif, tetapi juga bagian dari implementasi Stranas ATS. (26)

Pada tahun 2022, UNICEF melaksanakan program yang menjangkau ATS dengan tujuan mengidentifikasi, menarik kembali, dan memastikan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah. Program tersebut berlandaskan permasalahan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia yang semakin diperparah oleh dampak pandemi Covid-19 sehingga menghambat partisipasi anak dalam sistem pendidikan formal. Dalam implementasinya, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah daerah di 31 kabupaten atau kota untuk menjangkau lebih dari 10.000 anak yang tidak bersekolah serta 65.700 anak yang berisiko putus sekolah. Program tersebut fokus kepada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses pendidikan, seperti kendala ekonomi, keterbatasan geografis, diskriminasi gender, serta kebutuhan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas. Melalui pendekatan berbasis data, UNICEF dan pemerintah daerah mengembangkan sistem pemantauan guna mendeteksi kelompok rentan serta memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. (27)

Salah satu aksi nyata dari program tersebut adalah Program Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi (PASTI BERAksi) yang bertujuan untuk mengurangi angka anak tidak sekolah, meningkatkan akses pendidikan, dan mewujudkan pendidikan berkualitas di Sulawesi Selatan. Program tersebut diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa bagi anak yang

kurang mampu, serta peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah daerah bekerja sama dengan UNICEF, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. (28)

UNICEF juga turut mengambil peran dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani permasalahan ATS. Dalam kerja sama tersebut, UNICEF bersama Pemerintah Mojokerto mengencakan sosialisasi program penanganan ATS dan memperkenalkan kegiatan Lingkaran Remaja untuk memberdayakan kaum muda. Sebagai langkah strategis, UNICEF menggunakan metode Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dalam proses pendataan ATS. SIPBM merupakan pendataan yang melibatkan kepala keluarga sebagai responden untuk mengumpulkan data akurat sebagai dasar kebijakan. Pendataan tersebut menjadi landasan dasar untuk memperkuat program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. UNICEF menegaskan bahwa SIPBM mencerminkan bentuk dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam memantau program agar dapat tetap berlangsung. Melalui pendataan yang sistematis, UNICEF memastikan bahwa program-program Pemerintah Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan. Dengan berfokus pada desa-desa dengan angka ATS tinggi, program tersebut bertujuan menekan jumlah ATS secara signifikan. Namun, untuk mencapai dampak yang berkelanjutan, diperlukannya evaluasi berkala, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan aktif dari masyarakat. (29)

Pada tahun 2023, UNICEF memperluas upayanya dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berpotensi Putus Sekolah (ABPS) dengan memilih Kabupaten Mojokerto sebagai lokasi pelaksanaan program strategis. Program tersebut mencakup sosialisasi dan pengumpulan data di delapan desa yang tersebar di

empat kecamatan untuk memahami dan menangani permasalahan pendidikan di wilayah tersebut. Data Susenas tahun 2020 mencatat sekitar 10.000 anak di Mojokerto berada di luar sistem pendidikan formal, menunjukkan urgensi intervensi yang terencana dan berkelanjutan. Dalam merespons masalah tersebut, UNICEF menginisiasi gerakan berbasis masyarakat melalui berbagai langkah strategis, seperti pendataan ATS menggunakan SIPBM, merancang rencana aksi daerah yang lebih terfokus, serta memastikan akses pendidikan bagi ATS. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen UNICEF untuk menghadirkan solusi berbasis data dan melibatkan masyarakat secara aktif. (29,30)

Pada tahun yang sama, yakni 2023, UNICEF juga meluncurkan program terintegrasi di Kabupaten Bulukumba dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pengembalian ATS ke bangku sekolah, tetapi juga menargetkan penguatan kapasitas remaja perempuan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program tersebut dirancang untuk mengidentifikasi akar penyebab ATS melalui survei mendalam terhadap faktor-faktor yang memicu anak tidak bersekolah. Selain itu, UNICEF juga mengadopsi pendekatan intensif yang melibatkan keluarga anak dalam proses sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan sehingga anak dapat kembali bersekolah. (31)

Pada tahun 2024, Pemerintah provinsi Jawa Tengah menggandeng UNICEF untuk menuntaskan masalah pendidikan di daerah dengan tingkat ATS yang masih tinggi. Kerja sama tersebut menyelenggarakan program untuk mengatasi masalah ATS di 15 kabupaten dan kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Salah satu kontribusi utama UNICEF dalam program tersebut adalah mendukung penyusunan Rancangan

Aksi Daerah Pengentasan Anak Tidak Sekolah atau RAD P-ATS. Proses penyusunan tersebut tidak hanya berlangsung tingkat provinsi, tetapi juga mencakup desa dan kelurahan dengan tujuan memastikan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF dapat menjawab kebutuhan spesifik setiap wilayah. Rancangan kebijakan tersebut mencakup langkah-langkah strategis jangka panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan begitu, UNICEF tidak hanya menjadi mitra teknis, tetapi juga menjalankan perannya sebagai alat yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakannya. (32)

Peran UNICEF tidak terbatas pada dukungan terhadap perencanaan, tetapi juga secara aktif memastikan bahwa setiap pelaksanaan program yang dijalankan oleh UNICEF dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemegang kepentingan, UNICEF mampu menciptakan sinergi yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut mempertegas peran UNICEF sebagai alat yang mendorong implementasi kebijakan mengenai pendidikan yang tidak hanya memberikan solusi langsung bagi kelompok sasaran, tetapi juga memperkuat kapasitas sistem pendidikan untuk menghadapi tantangan jangka panjang.

5. KESIMPULAN

UNICEF berperan penting dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti dampak pandemi Covid-19, kasus anak putus sekolah, serta kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Sebagai organisasi yang fokus pada perlindungan hak anak, UNICEF terlibat dalam berbagai inisiatif, seperti pengembangan pembelajaran digital dan pelatihan guru, guna memastikan keberlanjutan proses

belajar mengajar yang berkualitas. Selain itu, UNICEF juga mendukung pengumpulan data berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah, sehingga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara. Dalam hal ini, UNICEF turut memperkuat kebijakan pendidikan Indonesia dan mendorong akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak. Kerja sama lintas sektor menjadi strategi penting dalam meningkatkan pemerataan pendidikan, khususnya untuk menjawab tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemanfaatan teknologi dan data menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan, sementara peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga harus terus digalakkan. Meskipun peran UNICEF telah memberi kontribusi positif, tantangan seperti anak putus sekolah dan kesenjangan pendidikan di wilayah terpencil masih perlu diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. UNICEF. Kemendikbudristek Bersama UNICEF Gelar Simposium Pembelajaran Digital yang Berkualitas Bagi Semua [Internet]. 2021 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/kemendikbudristek-bersama-unicef-gelar-simposium-pembelajaran-digital-yang-berkualitas>
2. UNESCO. Right to education: what you need to know [Internet]. 2024 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://www.unesco.org/en/right-education/need-know>
3. UNICEF. Pendidikan dan Remaja | UNICEF Indonesia [Internet]. 2019 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>
4. Abduh M, Basiru AA, Narayana MW, Safitri N, Fauzi R. Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor. *J Citizsh Virtues*. 2022 Mar 1;2(1):291–300.
5. Bentley A. Cooperation of the Government of the Central African Republic and UNICEF in Handling Cases of Recruitment of Child Soldiers in the Central African Republic. *Int J Sci Soc IJSOC*. 2023 Jan 27;5(1):86–93.
6. Karini P. PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH USIA 16—18 TAHUN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *AL-ISHLAH J Pendidik*. 2018 Jun 30;10(1):103–15.
7. Mudji DA, Caharamayang AL. Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia. *Transbord Int Relat J*. 2017 Dec 31;1(1):35–49.
8. Hidayanti R. Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang. *Spektrum Anal Kebijak Pendidik*. 2023 Dec 30;12(3):52–65.
9. Ariyani SNQ. TREN ANGKA PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Spektrum Anal Kebijak Pendidik*. 2018 Oct 26;7(4):440–51.
10. Madaniah F, Mutakin M, Nurjannah S, Darpin D. Sebab Akibat Banyak Anak Di Indonesia Yang Putus Sekolah. *Stud Res J [Internet]*. 2023 [cited 2026 Jan 11];1(1). Available from: https://www.researchgate.net/publication/390833303_Sebab_Akibat_Banyak_Anak_Di_Indonesia_Yang_Putus_Sekolah
11. Suyanto B. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana; 2017. 445 p.
12. Badan Pusat Statistik. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran - Tabel Statistik

- [Internet]. 2024 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MyMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kelompok-pengeluaran.html>
13. Hujaimah S, Fadhilah AA, Sasmita RFP, Salsabila 'Aisyah Naurah, Mariani M, Nugraha DM, et al. Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *J Pendidik Transform.* 2023 Dec 7;2(6):142–8.
 14. Kementerian Sekretariat Negara. Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia [Internet]. 2024 [cited 2026 Jan 11]. Available from: https://www.setneg.go.id/baca/index/pendidikan_di_wilayah_terpencil_tantangan_pemerintah_dalam_pemerataan_pendidikan_di_indonesia_1
 15. Faizi AN. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL MELALUI PELATIHAN GURU DAN PENYEDIAAN SUMBER BELAJAR DI DESA BESAR 2 TERJUN. *Inspirasi J Pengabdian Masy.* 2024 Sep 27;1(4):1–8.
 16. Anggita, Dewi DC. Peran PBB sebagai Organisasi Internasional Dalam Mengatasi Konflik Rusia Dan Ukraina Demi Membangun Perdamaian Dunia. *Uniku Law Rev.* 2024 Jun 23;2(01):1–12.
 17. Archer C. *International Organizations.* Psychology Press; 2001. 219 p.
 18. ANTARA. Antara News. 2020 [cited 2026 Jan 11]. Kementerian PPN luncurkan Stranas penanganan anak tidak sekolah. Available from: <https://www.antaranews.com/berita/1910400/kementerian-ppn-luncurkan-stranas-penanganan-anak-tidak-sekolah>
 19. GoodStats. GoodStats. 2024 [cited 2026 Jan 11]. Posisi Indonesia di PISA 2022, Siapkah untuk 2025? Available from: <https://goodstats.id/article/posisi-indonesia-di-pisa-2022-siapkah-untuk-2025>
 20. Medcom. medcom.id. 2020 [cited 2026 Jan 11]. Pemerintah Luncurkan Strategi Nasional Penanganan Anak Putus Sekolah. Available from: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/9K55XBPK-pemerintah-luncurkan-strategi-nasional-penanganan-anak-putus-sekolah>
 21. Merdeka. merdeka.com. 2020 [cited 2026 Jan 11]. Kemendikbud Catat 646.200 Sekolah Tutup Akibat Virus Corona. Available from: <https://www.merdeka.com/uang/kemendikbud-catat-646200-sekolah-tutup-akibat-virus-corona.html>
 22. ANTARA. Pengendalian COVID-19 UNICEF: Anak butuh belajar di sekolah [Internet]. 2020 [cited 2026 Jan 11]. Available from: https://www.antaranews.com/berita/1859068/pengendalian-covid-19-unicef-anak-butuh-belajar-di-sekolah?utm_source=chatgpt.com
 23. UNICEF. Innovation Challenge: Generasi Terampil [Internet]. 2022 [cited 2026 Jan 11]. Available from: https://www.unicef.org/indonesia/id/remoteaja/innovation-challenge?utm_source=chatgpt.com
 24. Harususilo. KOMPAS.com. 2021 [cited 2026 Jan 11]. Ajak Remaja Jadi Agen Perubahan, UNICEF dan Markoding Gelar “Tantangan Inovasi Digital 2021.” Available from: <https://www.kompas.com/edu/read/2021/10/22/153011471/ajak-remaja-jadi-agen-perubahan-unicef-dan-markoding-gelar-tantangan-inovasi>
 25. Pemkab Pemalang. Gerakan Remaja Hebat, Upaya Alternatif Atasi Persoalan Anak Tidak Sekolah [Internet]. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang. 2022 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://www.pemalangkab.go.id/2022/06/gerakan-remaja-hebat-upaya-alternatif-atasi-persoalan-anak-tidak-sekolah>
 26. Putri FKA, Amalia IK, Hakim ML. Gerakan Remaja Hebat untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah. indonesia-di-pisa-2022-siapkah-untuk-2025-6RLyK

- Kifah J Pengabdi Masy. 2022 Jun 28;1(1):71–82.
27. UNICEF. #SetiapAnakBerhak [Internet]. 2023 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>
28. Pratiwi PA. Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Rencana Aksi Percepatan Pengurangan Jumlah Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Selatan. *J Int Local Stud*. 2024 Jul 31;8(2):118–32.
29. Diskomunfo Mojokerto. Upayakan ATS Dapat Bersekolah Kembali, UNICEF Sosialisasikan Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Bumi Majapahit [Internet]. 2023 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://mojokertokab.go.id/detail-berita/upayakan-ats-dapat-bersekolah-kembali-unicef-sosialisasikan-program-penanganan-anak-tidak-sekolah-di-bumi-majapahit>
30. Pemerintah Desa Pohkecik. UNICEF Pilih Kabupaten Mojokerto Sebagai Pilot Project Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah - Pemerintah Desa Pohkecik [Internet]. 2023 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://pohkecik.desa.id/unicef-pilih-kabupaten-mojokerto-sebagai-pilot-project-pencegahan-dan-penanganan-anak-tidak-sekolah/>
31. Bulukumba D. WEBSITE BULUKUMBA. 2023 [cited 2026 Jan 11]. Bulukumba Jadi Pilot Proyek Unicef Penanganan ATS dan Penguatan Remaja Perempuan Terintegrasi - Bulukumbakab.go.id - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Available from: <https://bulukumbakab.go.id//rubrik/bulukumba-jadi-pilot-proyek-unicef-penanganan-ats-dan-penguatan-remaja-perempuan-terintegrasi>
32. Diskominfo Pati. UPTD PPA Kabupaten Pati [Internet]. 2024 [cited 2026 Jan 11]. Available from: <https://uptd-ppa.patikab.go.id/frontpanel/berita/detail/NEpLYmc1Q2dtRmw2VHRleUwwMGFtdz09>